

KALEBUN BEBINI' **(Kontruksi Budaya Masyarakat Madura dalam Melestarikan Kekuasaan)**

Tatik Hidayati

Institut Keislaman An-Nuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep
Kompleks PP. An-Nuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura

Abstrak

Fenomena *kalebun bebini'* (kepala desa perempuan) pada masyarakat Madura yang semakin merebak, tidak jarang hanya sebagai penerus dan melestarikan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh suami, bapak atau bahkan kakek mereka. Sehingga tulisan ini bermaksud mengungkap: *Pertama*: bagaimana konstruksi budaya Madura tentang peran dan posisi perempuan sebagai *kalebun*. *Kedua*: bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam menempatkan perempuan sebagai penerus kekuasaan politik pada kekuasaan desa (*kalebun*). *Ketiga*, bagaimana relevansi potensi dan kompetensi perempuan dalam posisinya sebagai *Kalebun*. Selanjutnya tulisan ini akan menggunakan empat pendekatan *Pertama*: pendekatan subyektif, dimaksudkan untuk mengetahui alasan atau motif serta apa yang sebenarnya yang diinginkan perempuan ketika menjabat sebagai *kalebun*, dalam faktanya posisi *kalebun* yang diperankan tidak lebih dari keinginan *outside view*. *Kedua*, pendekatan relasional, yaitu melihat pola relasi yang terbangun dalam keluarga dan masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Pada konteks ini proses menjadi *kalebun bebini'* telah memunculkan relasi dominatif dan subordinat melalui *public transcript*. *Ketiga*, pendekatan struktural, institusi *kalebun* dimaksudkan untuk membuat tatanan masyarakat yang bermartabat, dikotori oleh praktik-praktik politik kekuasaan yang tanpa makna dengan membolehkan berbagai cara, termasuk menjadi perempuan sebagai obyek keberlangsungan kekuasaan. *Keempat*, tulisan ini sebagai seruan moral untuk membangun kesadaran kolektif untuk mengedepankan politik makna, dengan menjunjung integritas dalam kepemimpinan.

Abstract

Phenomenon of *kalebun bebini* (women village head) in Madura society increasingly widespread, not infrequently just as successors and conservationists of power previously owned by their husbands, fathers or even their grandparents. So this paper intends to reveal: First, how cultural construction of Madura about the role and position of women as *kalebun*. Second, how the mechanism performed by men in regard women as a successor to the political power in the village authority (*kalebun*). Third, how the relevance of potential and competence of women in her position as *kalebun*. Furthermore, this paper will use four approaches: First, a subjective approach, intended to find out the reasons or motives, and what is actually desired by women when she served as *kalebun*, in fact position of the *kalebun* played no more than desire of outside view, Second, the relational approach, which is to see the pattern of relationships which are built into the family and society between men and women. In this context, the

process of becoming *kalebun bebhini* has given rise to dominating and subordinating relationships through public transcript. Third, the structural approach, *kalebun* institution intended to create a dignified social order, littered by practices of power politics without meaning to allow a variety of ways, including being women as the survival objects of power. Fourth, this paper as a moral appeal to build a collective consciousness to promote politics of meaning, by upholding integrity in leadership.

Kata Kunci

Kalebun bebhini', Madura, konstruksi budaya, kekuasaan

Pendahuluan

Masyarakat Madura menyebut pemimpin pada lingkup desa dengan istilah *kalebun*, atau kepala desa atau lurah sebagaimana sebutan yang digunakan pada masyarakat Jawa pada Umumnya. Di Madura dengan budaya masyarakat yang agamis menempatkan *kalebun* ini sebagai pemimpin administratif yang bersifat formal,¹ sehingga masyarakat membutuhkannya untuk keperluan yang bersifat administratif pemerintahan. Hal ini secara umum berbeda dengan fungsi kepala desa ataupun lurah di daerah Jawa yang tidak hanya diperlukan pada urusan administratif belaka tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Sedangkan persoalan sosial kemasyarakatan sampai pada urusan agama hampir semua diperankan oleh tokoh informal yaitu pemimpin keagamaan yang biasa disebut ulama' atau *kiyai*.

Kata *Bhebhini'* adalah sebutan untuk mengatakan perempuan pada masya-

rakat Madura. Perempuan mendapat tempat dan perhatian tersendiri dalam budaya Madura, ia dihormati sebagai seorang ibu, ia dijaga ketika menjadi anak dan menjadi simbol kehormatan ketika menjadi Istri. Dalam posisi budaya tersebut tidak jarang keberadaan perempuan diruang publik merupakan representasi dari keberadaan kaum laki-laki. Padahal dalam beberapa penelitian perempuan di Madura mempunyai potensi dan kompetensi dalam transformasi dan pemberdayaan perempuan di pedesaan.² Fenomena *kalebun bebhini'* (kepala desa perempuan) pada masyarakat Madura yang semakin merebak, tidak jarang hanya sebagai penerus dan melestarikan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh suami, bapak atau bahkan kakek mereka. Sehingga konstruksi yang di bungkus dengan budaya masyarakat yang kuat, dan tidak jarang mendapat legitimasi dari agama (yang direpresentasikan oleh tokoh agama) cenderung memandang dan menempatkan perempuan mempunyai posisi yang *inkompetensi* dan *inpower*.

Meskipun demikian modus pelestarian kekuasaan dengan menjadikan pe-

¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Kuntowijoyo, dalam tulisan lain Huub de Jonge mengatakan bahwa *kalebun* ini biasanya mempunyai kedekatan dengan preman atau blater, sebagaimana diungkapkan juga oleh Rozaki dalam bukunya " *Menabur Pesona Menuai Kuasa* ". bahkan dalam penelitian Saputra dikatakan *kalebun* mempunyai budaya yang bertentangan dengan budaya *kiyai*.

² Tatik Hidayati, Nyai Madura : Relasi Patron Klien dengan perempuan Pedesaan", Disertasi, 2012 dan "kompolan dan Transformasi Sosial" penelitian 2011.

rempuan sebagai pemimpin penerus juga menjadi fenomena diberbagai daerah bahkan tidak hanya pada tingkat desa, melainkan sebagai bupati,³ gubernur bahkan presiden⁴. Secara legal formal tidak ada larangan yang menerapkan hal ini, namun demikian jika didasarkan pada kemampuan yang dimiliki kaum perempuan itu harus kita apresiasi. Persoalannya adalah tidak jarang modus ini digunakan hanya semata-mata meneruskan kekuasaan dan menyelamatkan kekuasaan kaum laki-laki, supaya kebrobokan dan kejahatan yang dilakukan tidak terungkap. Lebih lanjut tidak jarang dalam posisi demikian perempuan menjadi pemimpin hanya sebagai simbol, sedangkan yang menjalankan pemerintahan yang sesungguhnya adalah suami, ayah bahkan kakeknya. Tidak jarang pula laki-laki yang ada disekitarnya baik itu saudara atau kroni mereka yang dianggap mampu, yang menjalankan kepemimpinan sedangkan *kelebhun bebhini'* ini hanya *noro'*.⁵

Pada bulan Mei 2013 tahap pertama dan oktober 2014 tahap kedua ini adalah bulan dimana kebanyakan Desa di Kabupaten Sumenep yang telah habis masa kepemimpinan kepala desanya akan mengadakan pemilihan. Penulis menjumpai sepanjang perjalanan penulis

disaat mengajar dengan jarak tempuh 40 KM diberbagai desa yang akan mengadakan pemilihan hampir semua mempunyai calon kepala desa perempuan. Ini berbeda dengan kesulitan yang dialami oleh beberapa partai yang kesulitan caleg perempuan guna memenuhi kuota. Hal ini menjadi fenomena yang menarik ditengah tarik menarik antara perebutan kekuasaan pada eksekutif pada tataran yang paling rendah yaitu desa dengan pada tingkat legislatif. Dimana kaum perempuan desa ini lebih tertarik menjadi kepala desa dari pada menjadi caleg, padahal keduanya sama-sama membutuhkan modal kapasitas dan modal finansial.

Melihat beberapa peristiwa dan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Madura khususnya di kabupaten Sumenep, penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana fenomena kalebun perempuan ditengah budaya Madura yang patriarkhis dan kepentingan akan pelestarian kekuasaan pada sisi yang lain. Disamping itu penting pula untuk melihat bahwa potensi perempuan sebagai bagaian dari kapasitas yang dimiliki kaum perempuan perlu ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam mengusung perempuan sebagai pemimpin dan pertimbangan penting dalam memilih. Karena dari beberapa fakta perempuan Madura mempunyai kapasitas dan kabapalitas baik itu dalam intelektualitas dan *leadership*. Untuk itu penelitian ini menjadi sesuatu yang relevan sebagai respon terhadap berbagai pandangan dan fenomena yang mendiskreditkan dan menjadikan perempuan sebagai alat legitimasi.

Tulisan ini difokuskan pada konstruksi budaya yang membingkai keberadaan perempuan sebagai *kalebun* dalam relasional yang memahami perempuan. Sehingga lebih ditekankan pada

³ Sebagaimana terjadi di Bantul Yogyakarta, di Indramayu Jawa Barat dan berbagai daerah lain

⁴ Ide untuk mencalonkan Ani Yudoyono istri dari SBY, bahkan hal ini pernah dilakukan oleh presiden Amerika Bill Clinton.

⁵ *Noro'* adalah mengikuti apa kemauan begitu saja tanpa diikuti pengetahuan. Sebagaimana penulis temui di desa Ambunten Barat kecamatan Ambuten, dimana terdapat seorang kalebun perempuan yang dimaksudkan meneruskan kekuasaan kakeknya, namun dalam menjalankan pemerintahan ia memasrahkan pada kakak iparnya (suami dari kakak perempuannya). Data ini penulis peroleh disaat satu bulan mendampingi mahasiswa KKN didaerah ini pada bulan Juni-Juli 2012

culture cualitatif field research yaitu menempatkan perempuan dalam berlatarbelakang budaya. Kerena menempatkan perempuan sebagai subyek utama. Untuk melihat persoalan tersebut akan menggunakan empat pendekatan:⁶ *pertama* : pendekatan subyektif, dimana penelitian ini memandang perempuan sebagai kelompok yang sadar memahami posisi kultural dan strukturalnya. Pendekatan ini penting untuk memandang perempuan dari dalam perempuan itu sendiri (inside view). Sehingga tidak ada penilaian positif atau negatif yang diberikan oleh pihak luar. Hal ini berusaha membangun konsep, nilai dan ukuran yang didefinisikan oleh perempuan itu sendiri.

Kedua, pendekatan relasional, ini untuk melihat kelas dan status didasarkan pada hubungan-hubungan yang terbentuk. Dalam hal ini melihat laki-laki sebagai pihak yang mengontrol peran dan status perempuan dalam konstruksi sosial, kultural dan struktural.

Ketiga, pendekatan Struktural, dimaksudkan untuk melihat struktur yang terbentuk dari sejarah atau alasan dibaliknyanya. Analisis ini penting untuk menguji tentang bagaimana keikutsertaan perempuan dalam politik kekuasaan dilihat dari akar yang mendasarinya. *Keempat*, pendekatan kebijakan sosial, yaitu penelitian ini dilihat sebagai sebagai sebuah *fenomene* yang dapat diterjemahkan dalam sebuah konsep dan kebijakan. Sehingga penelitian dapat dijadikan indikator kebijakan sosial yang menyangkut perempuan.

Tinjauan Pustaka

⁶ Sebagaimana dipaparkan oleh Olesen yang dikutip oleh Irwan Abdullah dalam ; *Sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan...*hal.14-16

Kajian terhadap perempuan, jika dilihat dari peran dan status tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang atau situasi budaya dan kultur yang mengitarinya. Pandangan umum yang menempatkan kajian ini secara general dan global akan semakin melihat perempuan pada posisi yang tidak sepadan dan semakin timpang dalam sebuah relasi kuasa, terlebih ideologi *mainstream*. Padahal dalam realitas kontruksi budaya dominan mendapatkan tempat dalam pembentukan peran dan status yang dilakoni kaum perempuan. Beberapa kekuatan tulisan tentang bagaimana melihat kontruksi budaya lokal terhadap peran gender laki-laki dan perempuan digambarkan dalam beberapa karya Irwan Abdullah seperti "*Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*",⁷ dan *Sex, Gender dan Reproduksi kekuasaan*".⁸ Tulisan ini menegaskan betapa meneliti perempuan senantiasa dilihat dari konteks lokal dimana perempuan lahir, hidup dan berproses didalamnya.

Tulisan yang berlatar belakang budaya Madura, kepulauan yang memisahkan dari kota Surabaya yang dihubungkan dengan jembatan suramadu yang secara ciri spesifik budaya dan kultur. Tepatnya di paling timur pulau ini yaitu kabupaten Sumenep yang secara kultur lebih kuat dan religius dibanding tiga kabupaten lainnya.⁹ Fokus penelitian ini adalah pada kontruksi masyarakat terhadap perempuan, maka sebagaimana dalam tulisan Irwan Abdullah akan

⁷ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kekuasaan*, (Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

⁸ Irwan Abdullah, *Sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Terawang Press, 2001)

⁹ Data ini secara spesifik dapat dilihat dari keberadaan keraton dan perkembangan pesantren dan madrasah dalam dua dekade yang lebih dari dua ratus persen. Ini secara jelas nampak berbeda dari tiga kabupaten yang lain.

mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ruang yang lain. Sehingga penting mengkaji penelitian yang berkaitan dengan budaya Madura dan perempuan dalam budaya Madura. Beberapa tulisan tentang Madura telah banyak memberi informasi dalam tulisan ini, seperti tulisan Kuntowijoyo,¹⁰ Huub De Jonge,¹¹ maupun karya I'ik Mansurnoor.¹² Namun demikian informasi ini tidak membicarakan perempuan Madura secara khusus akan tetapi lebih pada pembahasan geografis, kelas menengah dan peran ulama. Akan tetapi ini penting sebagai informasi awal tentang keberadaan *kalebhun* misalnya sudah disinggung terutama yang menyangkut peran administratifnya. Berbeda dengan Saputro,¹³ yang meneliti di daerah kepulauan tepatnya di Talango. Dimana dalam laporan tulisan itu ia menjelaskan bahwa *kalebhun* adalah tokoh yang secara budaya lebih dekat dengan kultur yang jauh atau bertentangan dengan kultur kyai. Keterlibatan *kalebhun* dalam pusran kekuasaan yang melibatkan pejabat dan kyai sebagaimana ditulis oleh Abdur Rozaki.¹⁴

Pembahasan yang secara mendalam tentang perempuan Madura adalah karya Anke Niehof; *Women and Fertility in*

*Madura*¹⁵, penting pula mengulas tulisan Helen yang memandang relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks Seni di Madura.¹⁶ Disertasi Tatik Hidayati : *Nyai Madura: Relasi patron klien dengan Perempuan Madura*,¹⁷ belum diterbitkan. Tulisan ini membahas perempuan sebagai elit agama (nyai) yang membangun relasi dengan perempuan sebagai klien yang ada dilingkungannya.

Berbagai karya diatas memberi informasi penting tentang perempuan, Madura, dan *Kalebhun* akan tetapi pembahasan utuh dan mendalam yang membahas bagaimana peran politik kekuasaan perempuan pada tingkat desa, belum terjawab dan terdiskripsikan secara mendalam dalam tulisan lainnya. Ini sekaligus sebagai gambaran bahwa karya tentang perempuan Madura bisa dikatakan jarang atau sangat sedikit dibanding dari segi budaya dan ulama. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan dapat membuka wacana dan realitas baru dari dinamika kehidupan perempuan Madura yang selama ini belum terungkap dan terrepresentasikan dalam karya penelitian yang mendalam.

Signifikansi Tulisan bagi Kuasa Perempuan

¹⁰ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.

¹¹ Jonge, Huub de, "Pembentukan Negara dengan Kontrak: Kabupaten Sumenep Madura, VOC dan Hindia Belanda, 1683-1883" dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

¹² Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesia World: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

¹³ Saputra, Endy, *Kiai Langgar and Kalebun*, Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2009.

¹⁴ Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2004.

¹⁵ Niehof, Anke, *Women and fertility in Madura*, Leiden: Disertasi Rijksuniversiteit, 1985. Dan "The Changing lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Pressure" dalam *Globalization, Localization, and Indonesia 154 No. 2* Leiden: Rijksuniversiteit, 1998 didownload dari <http://www.kitlv-journals.nl>, 25 Februari 2008

¹⁶ Bouvier, Helen, *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*, Jakarta: Forum Jakarta-Paris dan Yayasan Obor, 2002.

¹⁷ Tatik Hidayati, *Nyai Madura : Relasi Patron Klien dengan Perempuan Pedesaan*, Disertasi, 2012 dan "kompolan dan Transformasi Sosial" penelitian 2011.

Sebagai kajian tentang perempuan diharapkan pencerahan wacana dan sebuah aksi nyata dalam memberi penyadaran terhadap masyarakat dapat menciptakan relasi yang sewajarnya, dimana perempuan berperan harus dipandang sebagai sesuatu yang biasa, sebagai manusia potensi dan kapasitas dan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban. Secara budaya masyarakat madura dapat menempatkan keberadaan perempuan bukan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan akan tetapi lebih menciptakan *good goverment* dan pemberdayaan masyarakat. Secara Politik penelitian ingin menempatkan bahwa berpolitik kekuasaan seharusnya dengan etika penuh kesantunan dan tidak semata-mata menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan.

Bagian terpenting dari tulisan ini adalah sebagai upaya memahami dan memahami kemauan dan kemampuan perempuan sebagai bagian dari konteks budaya dan dalam gubangan kontestasi politik yang penuh dengan intrik dan kepentingan. Point ini diharapkan mampu menciptakan relasi baru dan masyarakat yang semakin menempatkan sistem budaya bagian dari bingkai yang tidak mendiskreditkan perempuan dan menjunjung tinggi keadilan.

Sebagai fenomena budaya posisi perempuan pada masyarakat Madura tidak dapat dilepaskan dari situasi masyarakat penuh dengan nilai religiutas yang tertanam dalam keluarga dan masyarakat. Posisi dominasi laki-laki seakan menemukan momentum ketika secara ideologis agama ikut berperan dalam menskonstrksididalamnya. Pada posisi ini penting kemudian tulisan ini sebagai sebuah penyadaran bagi kaum perempuan untuk juga mempunyai peran penting dalam mensahkan apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan kaum perempuan dengan dalih agama yang secara langsung diperankan oleh *religius leader* (kyai atau nyai). Sehingga penelitian ini sebagai suatu realitas yang bisa menjadi pertimbangan baru dalam mentransformasikan nilai-nilai agama yang lebih inklusif dan transformatif, terutama dalam memandang dan menempatkan perempuan.

Konstruksi Budaya dan Posisi *Kalebun Bebini'*

Berdasarkan empat pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, maka posisi *kalebun bebhini'* dapat kita lihat yang *pertama*, apa alasan perempuan pedesaan Madura menduduki posisi *kalebun*?. *Kedua*, tulisan ini ingin melihat secara relasional bukan saja antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi termasuk seluruh agen-sosial. *Ketiga*, apakah struktur dalam hal ini sejarah terbentuknya *kalebun*, dan bagaimana posisi perempuan selama ini dalam sistem *perkalebhun*\

1. Konstruksi Budaya

Pembahasan ini akan melihat perempuan Madura dari bingkai kultur masyarakat yang sudah terkonstruksi baik dalam keluarga dan masyarakat, maupun dalam status dan peran mereka secara individu maupun berkelompok. Pada keluarga pedesaan Madura paran dan status perempuan hampir sama dengan perempuan pedesaan di Jawa.¹⁸ Posisi perempuan sebagai anak dia akan mendapat perlakuan yang berbeda dalam pengasuhan dibanding anak laki-laki, termasuk kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Termasuk dalam hal perjodohan, didaerah pedesaan Madura jika

¹⁸ Sebagaimana digambarkan oleh Wardo dalam laporan hasil penelitiannya tentang "Wanita Pabrik: Simbol Pergeseran Status Wanita Desa" dalam Irwan Abdullah (ed). *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hal. 160-161

mempunyai anak perempuan umumnya dijdodihkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya,¹⁹ apabila si gadis ini menolak maka biasanya mereka dibilang sebagai anak yang *tak noro' ucak* (anak yang nurut kemauan orang tua). Beberapa fakta lain disaat posisi perempuan Madura sebagai istri maka pembagian ruang sosial perempuan dan laki-laki terbentuk. Wilayah dalam rumah, termasuk dapur adalah milik perempuan dan wilayah luar rumah termasuk *langgar* sebagai tempat menerima tamu adalah ruang laki-laki. Sedang ruang publik perempuan pedesaan Madura adalah *Kompolan* (kelompok pengajian), *lelabet* (istilah Madura dalam menyebut Ta'ziah), *long-nolongi*. Ruang publik perempuan tersebut sekaligus menegaskan peran sosialnya dalam masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan dan masih maraknya tradisi pernikahan dini pada anak perempuan di pedesaan, juga semakin menegaskan bahwa tradisi masyarakat Madura dikonstruksi dengan budaya patriarki yang sangat kental, dan kuat disetiap ruang perempuan. Ini selanjutnya dapat menjadi pintu masuk untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas.

2. Pendekatan Subyektif

Sehingga penjelasan di atas dapat digunakan dalam memahami kenapa alasan perempuan menduduki posisi sebagai *kalebhun*, banyak dipengaruhi oleh *outside view* atau bukan muncul dari inisiatif *inside view* serta ambisi pribadi dirinya. Melainkan banyak didasarkan ka-

rena ada keinginan kuat dari orang disekelilingnya, untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Berbagai fakta tersebut dapat dilihat dari berbagai pencalonan kepala desa yang diikuti kaum perempuan di beberapa desa.²⁰ Dari beberapa informasi yang didapat motif mereka calon kades adalah karena keinginan suami, bapak atau saudara yang sebelumnya menjabat sebagai *kalebhun* serta para pendukungnya. Karena tradisi yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dilindungi, dibawah pengarah sekaligus dihormati, maka seolah sudah menjadi kewajiban jika perempuan tunduk pada kemauan "kaum lelaki" sebagai wujud dari kepatuhan dan penghormatan perempuan terhadap mereka. Sebagaimana Foucault memaknai kekuasaan sebagai relasi kekuatan yang bersifat *imananen*, maka kecenderungan kekuasaan tersebut akan tetap diperjuangkan untuk tetap berlangsung sebagai cara mencapai tujuan dengan berbagai perangkat dan kekuatan.²¹ Terlebih jika dikuatkan pandangan kepemimpinan secara monarki yang memandang kekuasaan adalah sifatnya genetis, atau diturunkan secara ikatan kekeluargaan. Kelembun dalam sejarah memang bukan kedudukan yang bersifat turun temurun, akan tetapi melalui *ceplo'an*, yaitu pemilihan langsung oleh warga desa. Kemudian disahkan melalui selembar kertas oleh pemerintahan terkait.²²

Pada bagian ini yang terpenting adalah apa yang sebenarnya yang diinginkan perempuan ketika mereka telah menjabat sebagai *kalebun*? Apakah hanya

¹⁹ Ini berkaitan dengan tradisi yang berkembang pada masyarakat Madura secara umum. Beberapa data ini dapat dibaca pada tulisan Mien Ahmad Rifa'I, *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasnya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007) hal. 88-89

²⁰ Penulis sempat mendapatkan data mengenai hal ini didesa Kranjang, delikan, dst (bukan nama sebenarnya)

²¹ Michel Foucault, *Sex dan Kekuasaan*, (Jakarta: Pt Gramedia pustaka Utama, 1997) hal. 113-114

²² Mien Rifa'I, *Manusia Madura.....*, hal.108.

sekedar menjalankan kepatuhan dan penghormatan yang pasif sebagai bentuk pengabdian terhadap para “laki-laki” yang menginginkan mereka menduduki jabatan tersebut atau justru mereka dapat menjadikan kepatuhan tersebut sebagai ekspresi perempuan untuk membangun kekuasaan mereka sendiri dan memainkan ruang kekuasaan, sehingga ia mampu menaklukkan diri ke dalam kekuasaan dan mampu membuat keputusan-keputusan yang dapat berpengaruh terhadap publik.²³

3. Pendekatan Relasional

Selanjutnya, tulisan ini ingin melihat pola relasional yang terjadi dalam proses perempuan menjadi seorang *kalebhun*. Menyimpulkan apa yang terjadi pada motif awal perempuan menjadi calon, maka bisa dilihat sebenarnya relasi dominatif-subordinat begitu kentara antara laki-laki dan perempuan. Dimana kaum laki-laki dalam hal ini suami, bapak atau saudara, mempunyai dominasi yang kuat dalam mendorong perempuan apakah dia sebagai anak, istri, dan saudara mereka. Sedangkan perempuan menjadi pihak yang tidak mempunyai pilihan dan kekuatan untuk menolak atau bersikap atas desakan dan kemauan yang didasarkan ambisi, kepentingan kekuasaan tanpa makna. Di sini maka terjadi proses dominatif yang dibentuk melalui *public transcript*,²⁴ yaitu pelestarian relasi kuasa secara

ra ideologi yang hegemonis dan formal, dalam konteks ini melalui lembaga keluarga yang diwujudkan dalam penanaman nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Madura.

Transcript ini dapat berbentuk tindakan atau perbuatan yang ditampakkan pada relasi yang sifatnya terbuka atau tersembunyi. Dalam hal ini seharusnya perempuan sebagai pihak yang tersubordinasi mampu melakukan transcript secara tersembunyi, ini yang dinamakan sebagai *Hidden Transcript*. Sehingga perempuan dalam posisinya sebagai *kalebhun* mampu melakukan perlawanan-perlawanan yang sifatnya tersembunyi terhadap tindakan dominatif yang terjadi pada dirinya. Bentuk perlawanan ini tidak selalu menentang nilai budaya dan agama yang berkembang pada masyarakat Madura, tetapi tetap memsuki wilayah kekuasaan baik secara kultural maupun formal dan kemudian ia mampu memainkan ruang kekuasaan, sehingga ruang ini tetap tercipta model diplomasi, tawar-menawar, dan pemihakan terhadap kaum yang tersubordinasi, terutama perempuan.

Akan tetapi apabila perempuan tidak memunculkan kesadaran untuk melakukan tindakan sebagai bentuk perlawanan simbolik tadi, posisi *kalebhun* akan menjadi lembaga yang berperan melestarikan proses dominatif siapapun yang menduduki dan akan tetap menempatkan perempuan secara sub-ordinatif. Jika ini terjadi pada masyarakat desa, maka perempuan sebagai pihak yang resisten akan semakin terhegemoni baik dalam kultur dan struktur masyarakat Madura.

4. Pendekatan Struktural

Hidden Transcript, (New Haven and London: Yale University Press, 1990).

²³ Sebagaimana diungkapkan oleh Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hal. 207-208

²⁴ Sebagaimana diungkapkan oleh Scott relasi kuasa terdapat pada dua tataran realitas, pertama adalah *public transcript*, yaitu bentuk relasi yang bersifat terbuka antara pihak yang subordinat dan pihak yang mensubordinat. dan. Sebaliknya, *hidden transcript* merupakan transcript dari kaum yang tersubordinasi dalam melakukakn perlawanan secara diam-diam atau tersembunyi. James Scott, *Domination and the Art of Resistance*:

Penjelasan selanjutnya adalah akan melihat dengan analisis struktural, dalam hal ini akan melihat *kalebun* sebagai struktur. *Kalebun* sebagai sebuah institusi telah terbentuk mulai zaman Belanda, meski ini bukan suatu lembaga yang secara spesifik melakukan hegemoni terhadap perempuan, *kalebun* merupakan jabatan yang identik dengan sifat maskulin. Bahkan tidak jarang *kalebun* mempunyai kedekatan dengan *bajhing* atau *blater*. Ini dianggap penting karena untuk melindungi keamanan warga, sehingga kedekatan ini untuk mengendalikan mereka. terlepas dari dalih dan alasan tersebut secara tradisi di beberapa tempat *kalebun* juga dekat dengan tradisi yang bukan kalangan "santri" yang biasanya banyak mengisyaratkan ritual keagamaan. Akan tetapi justru banyak mengakomodir tradisi kaum "abangan" seperti *tandhek*,²⁵ *saronen* yang secara spesifik menjadikan perempuan sebagai obyek hiburan seperti tempat menyawer dan berjoget bersama.

Sehingga tidak jarang posisi *kalebun bebhini'* hanya dijadikan symbol, karena secara budaya ia tidak dapat memasuki wilayah maskulinitas sebagaimana dipaparkan diatas. Padahal seharusnya *kalebun bebhini'* mampu menjadikan institusi *kalebun* sebagai institusi yang bermanfaat dan bermartabat dimata masyarakat tanpa harus mentolirir perilaku yang secara norma tidak dapat dibenarkan. Ini bukan bagian dari melawan tradisi atau budaya, akan tetapi lebih pada melakukan proses perubahan dalam masyarakat secara nilai dan etika, sehingga tradisi dan budaya dapat dilestarikan dengan penuh keberadaban.

Diakhir tulisan ini saya mengajak melakukan suatu refleksi dari beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa desa dalam melakukan proses demokrasi pada tingkat yang paling bawah yaitu desa, perlu diikuti oleh kesadaran secara kultur bahwa masyarakat Madura adalah menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, yang penuh dengan kesantunan dan kehormatan. Sehingga cara dalam mewujudkan nilai tersebut jangan sampai dicerai oleh politik kekuasaan yang tanpa makna (politik yang tercerabut dari akar sejarah budaya lokal)²⁶, dengan mengko-tori melalui politik uang yang seakan sudah menjadi bagian dari budaya kita, atau melakukan berbagai cara untuk tetap melestarikan kekuasaan termasuk mengeksploitasi kaum perempuan sebagai alat kekuasaan.

Apabila upaya untuk menghadirkan kepemimpinan desa yang demokratis, santun dan bermartabat dilakukan oleh seluruh agen sosial, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan mempunyai kesadaran moral kolektif tentang perlunya integritas pemimpin. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, bukan semata-mata mereka laki-laki atau perempuan, keturunan *kelebun* atau bukan, sampai pada seberapa banyak mereka mampu membagikan uang. Komitmen tentang integritas kepemimpinan sekaligus akan mengeliminir hasrat untuk melestarikan kekuasaan, termasuk menjadikan perempuan sebagai alat kekuasaan. Kerena kepemimpinan yang bersih tidak membuat mereka sibuk menutupi kebobrokan dan kecurangan yang terjadi disaat mereka menjabat.

²⁵ Endy Saputra, *Kiai Langgar and Kalebun*, (Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2009).

²⁶ Penjelasan tentang politik makna dapat dibaca dalam tulisan Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 138-155

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan: *Konstruksi dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- _____ : *Sex, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Terawang Press, 2001
- _____. *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Bouvier, Helen, *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*, Jakarta: Forum Jakarta-Paris dan Yayasan Obor, 2002.
- Foucault, Michel, *Sex dan Kekuasaan*, Jakarta: Pt Gramedia pustaka Utama, 1997
- Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 2008
- Hidayati, Tatik, *Nyai Madura : Relasi Patron Klien dengan Perempuan Pedesaan*, Disertasi, 2012 dan "kompolan dan Transformasi Sosial" penelitian 2011.
- Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesia World: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Jonge, Huub de, "Pembentukan Negara dengan Kontrak: Kabupaten Sumenep Madura, VOC dan Hindia Belanda, 1683-1883" dalam Huub de Jonge (edt.), *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Niehof, Anke, *Women and fertility in Madura*, Leiden: Disertasi Rijksuniversiteit, 1985. Dan "The Changing lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Pressure" dalam *Globalization, Localization, and Indonesia* 154 No. 2 Leiden: Rijksuniversiteit, 1998 didownload dari <http://www.kitlv-journals.nl/>, 25 Februari 2008
- Saputra, Endy, *Kiai Langgar and Kalebun*, Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2009.
- Scott, James, *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcript*, New Haven and London: Yale University Press, 1990
- Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Rifa'I, Mien Ahmad, *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasnya*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007